

BAB I

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu Entitas Pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistimatis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan (SAP.2010).

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan serta entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga lebih memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Memberikan Informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan Perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode Pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang di alokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasusimkan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi Kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang di kelola Pemerintah untuk mencapai kinerja yang di rencanakan

TUJUAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas posisi keuangan dan keseluruhan transaksi dalam periode pelaporan 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan OPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintahan.
6. Menyediakan Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Perubahan Ekuitas

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penulisan Calk Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1.Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2.Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4.Peraturan Menteri Nomor : 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di rubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 1425);
- 9.Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor : 0253);
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Ndao Nomor : 42 Tahun 2014 Tentang Sistim Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor : 0254);

1.3 SISTIMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Kebijakan Keuangan

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

5.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

5.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4 Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada SKPD

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan-LO

5.2.2. Beban

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

5.2.4. Pos Luar Biasa

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

BAB VI. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB VII. Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor.03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perubahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao, Nomor: 04 Tanggal, 15 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan ringkasan :

Tabel 2.1 : Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah perubahan	(Rp)
BELANJA DAERAH	5.703.716.500,-	9.634.348.700,-	(2.337.916.400,-)
Belanja Operasi	5.685.016.500,-	7.057.932.200,-	(6.162.900.600,-)
Belanja Barang & Jasa	3.400.278.00,-	4.704.278.700,-	(1.372915.700,-)
Belanja Pegawai	2.284.737.800,-	2.353.653.500,-	(68.915.700,-)
Belanja Modal	18.700.000,-	983.700.000,-	(965.000.000,-)
Belanja Modal Perlatan Mesin	18.700.000,-	18.700.000	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	965.000.000,-	965.000.000,-
SURPLUS /DEFISIT	(5.703.716.500,-)	(9.634.348.700,-)	(2.337.916.400,-)

Jumlah Dana yang dikelola Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (lembaran Daerah kab. Rote Ndao Tahun 2024 no 004);11 sebesar Rp. 10.837.389.700, terdiri dari Belanja Operasi Rp.14.082.389.300,- dan Belanja Modal Rp. 731.240.000,-

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 oleh Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Daerah Nomor, 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi 8 (Delapan) program utama dan 15 (Lima belas) kegiatan Pencapaian atas efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 6 (Enam) kegiatan.
2. Program Pengembangan Perumahan meliputi 1 (satu) Kegiatan.
3. Program Kawasan Permukiman meliputi 2 (dua) Kegiatan
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Meliputi 1 Kegiatan.
5. Program Penatagunaan Tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota meliputi 1 (satu) Kegiatan.
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup meliputi 1 (Satu) Kegiatan.
7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi 2 (dua) Kegiatan
8. Program Pengelolaan Persampahan meliputi 1 (satu) Kegiatan.

Target Realisasi Kinerja yag disajikan dalam pelaporan ini adalah terhadap pelaksanaan 8 (Delapan) program utama dan 15 (Lima belas) kegiatan dengan rincian :

Tabel 2.2 : Realisasi Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Target %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	.		
2.	Program Pengembangan Perumahan.			
	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupate/Kota.	Terlaksananya Pembangunan/Rehab.Rumah korban bencana dan relokasi akibat program Pemerintah.	2 Unit	100%
3.	Program Kawasan Permukiman.			
	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat.	1 Dokumen 50 Unit	56,20
	2. Penataan danPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	.	1 Dokumen	100%
4.	1. Program Penatagunaan tanah.			
	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya luas lahan bersertifikat.	Ha	100%

5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup.			
	1. Surat Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (SPPLH) Kab/Kota.	Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup.	3 Dokumen	100%
	2. Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD) Kabupaten/Kota.	Meningkatkan Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup (Dokumen).	1 Dokumen	100 %
7.	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.			
	1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.	Meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup Hidup.	1,52 Point	100 %
	2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.	Terlaksanya Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	1,52 Point	100 %
6.	Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.			
	1. Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	2. Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
8.	3. Program Pengelolaan Persampahan.			
	4. Pengelolaan sampah.	Volume sampah di kurangi.	67,23 %	100%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Capaian target kinerja keuangan dapat dijelaskan bahwa jumlah dana yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 8.650.648.700,- terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal

1. Belanja Operasi

Jumlah dana untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.353.653.500,- meliputi belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 2.256.233.500,- serta tambahan penghasilan sebesar Rp. 116.460.000,- Realisasi Belanja untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.893.460.623,- atau Tingkat pencapaian target sebesar, 98,72 % dan realisasi untuk belanja tambahan penghasilan sebesar Rp. 118.548.000,- atau 96,36 %.

2. Belanja Modal.

Jumlah alokasi dana untuk Belanja Modal sebesar Rp. 983.700.000,- yang penggunaannya untuk Belanja Modal Peralatan sebesar Rp. 18.700.000,- realisasi belanja sebesar Rp. 18.700.000,- dengan tingkat capaian 100% dan Belanja Modal Taman sebesar Rp. 965.000.000,- realisasi belanja sebesar Rp. 780.967.309,- dengan tingkat capaian 80,93%.

Dari Alokasi dana Belanja Operasi dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.668.399.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.484.445.561,- sisa anggaran = Rp. 183.953.939,- atau (93,11 %) tujuan yang dicapai adalah meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan jumlah dokumen terkirim, Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pelayanan kegiatan, kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, Peningkatan informasi pengetahuan dan kinerja aparatur serta koordinasi dan terwujudnya pelayanan pembangunan.
2. Program Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota total dana sebesar Rp. 95.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 95.200.000,- sisa anggaran =Rp. 0,- (100 %).
3. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan alokasi Dana sebesar Rp. 2.357.515.700,- Tujuan yang dicapai adalah terlaksananya

peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Dengan Realisasi Keuangan sebesar =Rp. 2.363.318.043,- dan Sisa Anggaran sebesar = Rp. 31.197.657,- (98,68 %).

4. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan Alokasi Dana sebesar =Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar =Rp. 190.382.298,- Sisa anggaran =Rp.9.617.702,- (95,19 %). Tujuan yang dicapai Meningkatnya luas lahan bersertifikat.
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) yaitu kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota dengan Alokasi Dana Sebesar =Rp. 322.859.000,- dan Realisasinya sebesar =Rp. 315.693.823,- dan Sisa Anggaran sebesar =Rp.7.165.177,- (97,78%). Tujuan yang dicapai adalah meningkatnya Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao .
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan alokasi dana sebesar =Rp. 225.000.000,- yaitu kegiatan Pencegahan,Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan anggaran sebesar =Rp. 175.000.000,- realisasinya sebesar =Rp.170.994.700,- Sisa Anggaran sebesar =Rp.4.005.300,- (97,71 %). berikut Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan Anggaran sebesar = Rp. 100.000.000,- realisasinya sebesar = Rp. 96.916.900,- dan Sisa Anggaran sebesar =Rp.3.083.100,- (96,92%) Tujuan yang dicapai adalah Terlaksananya pencegahan, Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao.
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar =Rp. 1.110.000.000,- realisasi sebesar =Rp. 925.659.472,- sisa anggaran =Rp. 184.340.528,- (83,39 %) Tujuan yang ingin di capai terlaksananya Operasional pengelolaan sampah.
8. Program Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar =Rp. 1.062.658.000,- realisasi sebesar =Rp. 1.008.788.500,- sisa anggaran =Rp. 53.869.500,- (94,93 %) Tujuan yang ingin di capai terlaksananya Operasional pengelolaan sampah.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yang ditetapkan antara lain disebabkan :

-  Keterbatasan Sumberdaya Aparatur baik Kuantitas maupun Kualitas.
-  Waktu Pelaksanaan Program/Kegiatan tidak mengikuti jadwal yang sudah di tentukan.
-  Masalah-masalah yang terdapat di lapangan seringkali menghambat pelaksanaan Program/Kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan LK. SKPD.

Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah **Basis Akrua**l yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca diakui berdasarkan **Basis Akru**l, yaitu pada saat di perolehnya hak atas aset tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di keluarkan dari Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 berupa LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca telah mengaju pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian dalam Penyusunan LK-SKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintah.

4.2. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan LK-SKPD.

Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komposisi laporan keuangan entitas akuntansi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana (non asset) pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama suatu periode pelaporan serta membandingkan realisasi tersebut dengan anggarannya dalam pelaporan yang sama.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas rincian angka yang tertera dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan agar pembaca dapat memahami secara luas.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi Badan Keuangan dan Aset

Kab. Rote Ndao terdiri dari :

1. Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar pada saat transaksi barang dan jasa tersebut diterima

2. Belanja

✚ Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang/kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

✚ Belanja Modal diukur sebagai harga perolehan

✚ Harga perolehan adalah harga pembelian aset berkenaan ditambah dengan biaya–biaya yang harus dikeluarkan agar aset siap digunakan

✚ Biaya–biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan adalah pegawai dan/atau belanja barang jasa. Belanja ini di akui sebagai harga perolehan dalam jumlah yang rasional.

3. Aset

➤ Kas dan setara kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

➤ Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang–undangan adalah sebagai berikut :

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding;
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan pajak;

- d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang–undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah
- + Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas umum daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut
- + Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- + Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
- + Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- + Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh
- + Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- + Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- + Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 belum melakukan penyusutan atas aset tetap.

4. Kewajiban

- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- ✚ Pada saat pemerintah menerima hak barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- ✚ Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

5. Ekuitas dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan SAP pada SKPD.

4.3.1. Konversi LK-SKPD

Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang terdiri atas LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun berdasarkan Struktur Anggaran APBD sesuai Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, sehingga terdapat perbedaan struktur akun Pendapatan dan belanja bila di bandingkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP.Nomor : 71 Tahun 2010). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah langkah konversi.

4.3.1.1. Konversi untuk LRA.

Sesuai struktur laporan realisasi anggaran menurut APBD atau sebelum konversi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, setelah dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu di konversi ke Belanja Operasi, sedangkan untuk belanja Langsung konversi sebagai berikut :

- a. Dari Komponen Belanja Langsung,yaitu Belanja Pegawai ke Komponen Belanja Operasi pada Akun Belanja Pegawai.
- b. Dari Komponen Belanja Langsung,yaitu Akun belanja barang dan Jasa ke komponen belanja barang
- c. Dari Komponen Belanja Langsung,yaitu akun belanja Modal ke komponen belanja Modal.

4.3.2. LRA, LO, LPE, Neraca dan Calk

Sistim Akuntansi Pemerintah dirancang untuk menghasilkan LK-OPD. yang terdiri dari :

1. **Laporan Realisasi Anggaran SKPD.**

Laporan Realisasi APBD pada unit kerja Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh Program dan Kegiatan yang telah dijabarkan dalam DPA-OPD. Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao. Laporan Realisasi Anggaran OPD terdiri dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

- a. Angka realisasi Belanja Daerah yang di sajikan pada Laporan Realisasi APBD OPD Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup TA. 2024 berdasarkan kompilasi realisasi belanja dari 8 (Delapan) program utama dan 15 (Lima belas) kegiatan 8 (oleh Bendahara Pengeluaran).

2. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi Pendapatan-LO, beban dan surplus/Deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya di sebut LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,surplus/deficit-LO,koreksi dan ekuitas akhir.

4. **Neraca OPD.**

Neraca Unit Kerja Dinas Perumahan,kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup disusun berdasarkan data yang di kelola oleh Sub.Bagian Keuangan serta Unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau ,menguasai aset OPD. Data mengenai kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Piutang, Aset Tetap dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Unit Kerja Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023.

5. **Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi,penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yng disajikan dalam

4.4. Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.4.1. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali. Selama Tahun berjalan,Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas (Pendapatan-LRA) dan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, terdapat 2 (dua) kondisi pengakuan pendapatan – LO yaitu :

1. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
2. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.

4.4.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat,ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selama tahun berjalan, pengakuan beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun melalui Uang Persediaan yaitu beban dicatat ketika bendahara pengeluaran membuat pertanggung jawaban (SPJ) yaitu beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat 2 (dua) kondisi pengakuan beban yaitu :

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan
2. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-(Nol Rupiah)

5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.567.265.397,- atau mencapai 94,10 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 8.041.632.200,-

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp**7.057.932.200,-** yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.353.653.500,- meliputi belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp.2.256.233.500,- serta tambahan penghasilan sebesar Rp. 116.460.000,- Realisasi Belanja untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.083.603.787,- atau Tingkat pencapaian target sebesar, 92,35 % dan realisasi untuk belanja tambahan penghasilan sebesar Rp. 115.380.000,- atau 99,07 % dan belanja pegawai langsung yang terdiri dari honorarium PNS sebesar Rp. 97.420.000,- realisasi sebesar Rp. 97.420.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.704.278.700,- realisasi sebesar Rp. 4.586.574,301,-.

Tabel 5.1

Ringkasan Belanja Pegawai Tidak Langsung TA.2024

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai Tidak Langsung				
1. Gaji dan Tunjangan	2.139.773.500	1.968.223.787	91,98	171.549.713
Gaji PokokPNS/Uang Representasi	1.624.644.000	1.555.289.433	95,73	69.354.567
Tunjangan Keluarga	120.960.000	97.352.792	80,48	23.607.208
Tunjangan Jabatan ASN	115.990.000	114.910.000	99,07	1.080.000
Tunjangan Fungsinal	107.520.000	60.240.000	56,03	47.280.000
Tunjangan Fungsional Umum	46.130.000	43.910.000	95,19	2.220.000
Tunjangan Beras	90.720.000	70.030.140	77,19	20.689.860
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.828.000	13.670.860	81,24	3.157.140
Pembulatan Gaji	49.140	23.770	48,37	25.370
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.	4.510.680	3.199.191	70,92	1.311.489
Iuran Jaminan Kematian ASN.	12.421.680	9.597.601	77,26	2.824.079
2. Tambahan Penghasilan PNS	116.460.000	115.380.000	99,07	1.080.000
Tambahan Penghasilan	116.460.000	115.380.000	96,36	1.080.000

1. Belanja Langsung : Rp. 12.348.719.900,-

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.668.399.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.484.445.561,- sisa anggaran = Rp. 183.953.939,- atau (93,11 %) tujuan yang dicapai adalah meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan jumlah dokumen terkirim, Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pelayanan kegiatan, kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, Peningkatan informasi pengetahuan dan kinerja aparatur serta koordinasi dan terwujudnya pelayanan pembangunan.
- b. Program Pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota total dana sebesar Rp. 95.200.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 95.200.000,- sisa anggaran =Rp. 0,- (100 %).
- c. Program Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan alokasi Dana sebesar Rp. 2.357.515.700,- Tujuan yang dicapai adalah terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Dengan Realisasi Keuangan sebesar =Rp. 2.363.318.043,- dan Sisa Anggaran sebesar = Rp. 31.197.657,- (98,68 %).
- d. Program Penatagunaan Tanah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan Alokasi Dana sebesar =Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar =Rp. 190.382.298,- Sisa anggaran =Rp.9.617.702,- (95,19 %).
- e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) yaitu kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota dengan Alokasi Dana Sebesar =Rp. 322.859.000,- dan Realisasinya sebesar =Rp. 315.693.823,- dan Sisa Anggaran sebesar =Rp.7.165.177,- (97,78%).
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dengan alokasi dana sebesar =Rp. 225.000.000,- yaitu kegiatan Pencegahan,Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota dengan anggaran sebesar =Rp. 175.000.000,- realisasinya sebesar =Rp.170.994.700,- Sisa Anggaran sebesar =Rp.4.005.300,- (97,71 %). berikut Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan Anggaran sebesar = Rp. 100.000.000,- realisasinya sebesar = Rp. 96.916.900,- dan Sisa Anggaran sebesar =Rp.3.083.100,- (96,92%).
- g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar =Rp. 1.110.000.000,- realisasi sebesar =Rp. 925.659.472,- sisa anggaran =Rp. 184.340.528,- (83,39 %).

- h. Program Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar =Rp. 1.062.658.000,- realisasi sebesar =Rp. 1.008.788.500,- sisa anggaran =Rp. 53.869.500,- (94,93 %).

Tabel 5.2

Ringkasan Belanja Pegawai Langsung TA.2024

	Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai Langsung	97.420.000,-	97.420.000,-	100	00,-
1. Honorarium PNS	97.420.000,-	97.420.000,-	100	00,-
Jumlah	97.420.000,-	97.420.000,-	100	00,-

1.2. BELANJA BARANG

Pos belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp.. 2.501.079.000,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 2.396.003.371,- atau 95,45%. dengan rincian :

Tabel 5

Ringkasan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA.2024

No	Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	1.333.327.000,-	1.261.131.842,-	94,68	72.195.158,-
2	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	490.400.000,-	475.509.506,-	96,96	14.890.430,-
3	Belanja Pemeliharaan	82.500.000,-	7.771.200,-	94,20	478.800,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	669.102.000,-	651.590.823,-	97,38	35.371.841,-
	JUMLAH	2.501.079.000,-	2.396.003.371,-	95,45	10.5075.629

Tabel : 5.4 : Belanja Barang yang dialokasikan untuk kegiatan

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
-----	----------------	---------------	------------------------	---	--------------------

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.655.000	33.643.500	99,97	11.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.307.353.500	2.134.723.787	92,52	172.629.713
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.199.000	195.092.000	99,02	107.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.117.000	35.591.700	84,51	6.525.300
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.075.000	76.394.574	94,23	4.680.426
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.200.000	95.200.000	100,00	-
9	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	441.470.000	425.278.343	96,33	16.191.657
10	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1.916.045.700	1.901.039.700	99,22	15.006.000
11	Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000	190.382.298	95,19	9.617.702
12	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	322.859.000	315.693.823	97,71	7.165.177
13	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	175.000.000	170.994.700	99,87	4.005.300
14	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.000.000	49.783.000	99,57	217.000
15	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.110.000.000	925.659.472	83,39	184.340.528
16	Pengelolaan Sampah	1.062.658.000	1.008.788.500	94,93	53.869.500
Jumlah		8.041.632.200	7.567.265.397	94,10	474.366.803

1. BELANJA MODAL

Pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 983.700.000,- dengan realisasi belanja Rp. 799.667.309,- atau 81,29 % Sisa Dana sebesar =Rp. 184.032.691,-

Belanja modal terdiri dari :

- Belanja peralatan dan mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 5.5 : Belanja Modal TA. 2024

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%	Sisa Anggran (Rp)
1.	Belanja Modal Komputer Unit	18.700.000,-	18.700.000,-	100	00,-
2.	Belanja Modal Taman	965.000.000,-	780.967.309,-	81,72	184.032.691,-
	Jumlah	983.700.000,-	799.667.309,-	81,72	184.032.691,-

5.1.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entits pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,beban,dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2024 menunjukan Nilai Pendapatan sebesar Rp. **-,0 (Nihil)**. Beban Operasional terdiri dari Beban Operasi Sebesar Rp. **8.584.460.602,82,-** Surplus serta deficit operasional sebesar Rp. **(8.584.460.602,82,-)**.

TABEL OPERASIONAL

Periode 01 Januari – 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
2	3	4	5
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00
BEBAN	8.584.460.602,82	7.697.314.243,00	887.146.359,82
BEBAN OPERASI	8.584.460.602,82	7.697.314.243,00	887.146.359,82
Beban Pegawai - LO	2.181.276.945,00	2.128.574.623,00	52.702.322,00
Beban Persediaan	2.159.416.450,00	2.132.150.600,00	27.265.850,00
Beban Jasa	1.736.641.348,00	2.781.770.861,00	-1.045.129.513,00
Beban Pemeliharaan	-101.450.963,00	9.000.000,00	-110.450.963,00
Beban Perjalanan Dinas	651.590.823,00	645.818.159,00	5.772.664,00
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	1.956.985.999,82		1.956.985.999,82
SURPLUS/DEFISIT-LO	-8.584.460.602,82	-7.697.314.243,00	-887.146.359,82

5.1.. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan Ekuitas disusun untuk melengkapi pelaporan dari sirkus akuntansi berbasis akrual sehingg Penyusunan Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan berbagai unsure ekuitas awal,surplus/(deficit)-LO.

Laporan Perubahan EKUITAS

Per 31 Desember 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	55.400.615.213,83	71.526.423.699,83
SURPLUS/DEFISIT-LO	-8.584.460.602,82	-7.697.314.243,00
Silpa/Sikpa LRA	-6.786.298.088,00	-8.428.494.243,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:3	465.525.000,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	465.525.000,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	40.495.381.523,01	55.400.615.213,83

5.1.2 POS-POS REALISASI NERACA

Neraca Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset Daerah, kewajiban daerah dan ekuitas dana pada periode atau tanggal tertentu. Neraca Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao TA.2024 menunjuk nilai Aset sebesar = Rp. **42.895.634.681,01,-** Neraca per 31 Desember 2023 nilai Aset sebesar= Rp. **57.800.615.213,83** serta mutasi kenaikan/penurunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.6
POS-POS REALISASI NERACA

URAIAN	2024	2023	Bertambah / (berkurang)
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	33.789.480,00	2.635.000,00	31.154.480,00
JUMLAH ASET LANCAR	33.789.480,00	2.635.000,00	31.154.480,00
ASET TETAP			
Tanah	4.603.312.900,00	4.603.312.900,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.228.730.883,00	5.744.505.883,00	484.225.000,00
Gedung dan Bangunan	13.470.041.319,59	13.470.041.319,59	0,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	37.895.239.057,00	37.895.239.057,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	647.685.000,00	647.685.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	918.189.472,00	28.000.000,00	890.189.472,00
Akumulasi Penyusutan	-20.901.353.430,58	-16.256.683.490,76	-4.644.669.939,82
JUMLAH ASET TETAP	42.861.845.201,01	46.132.100.668,83	-3.270.255.467,82
ASET LAINNYA			0,00
Aset Lain-lain	11.665.879.545,00	11.665.879.545,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-11.665.879.545,00	0,00	-11.665.879.545,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	11.665.879.545,00	-11.665.879.545,00
JUMLAH ASET	42.895.634.681,01	57.800.615.213,83	-14.904.980.532,82
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Belanja	253.158,00	0,00	253.158,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.400.253.158,00	2.400.000.000,00	253.158,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.400.253.158,00	2.400.000.000,00	253.158,00
EKUITAS DANA			
JUMLAH EKUITAS DANA	40.495.381.523,01	55.400.615.213,83	-14.905.233.690,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	42.895.634.681,01	57.800.615.213,83	-14.904.980.532,82

5.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi Kas, dalam satu periode akuntansi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam neraca Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungn Hidup Kabupaten Rote Ndao periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. **42.895.634.681,01,-** Sedangkan aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp.**57.800.615.213,83,-** atau menurun sebesar =Rp-**14.904.980.532,82**

a. Aset Lancar

Adalah merupakan sumberdaya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

Aset lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. terdiri dari:

✚Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 sebesar Rp. 0,- (Nihil) merupakan mutasi penerimaan dan pengeluaran kas di Bendahara Pengeluaran yang dapat dirinci sebagai berikut :



Saldo awal		Rp.	33.789.480,00
Mutasi Penerimaan			
~ Uang Persediaan	Rp.	120.000.000,00	
~ Ganti Uang Persediaan	Rp.	1,114.121.295,00	
~ Tambahan Uang	Rp.	0,00	
Persediaan			
~ LS BTL	Rp.	2.387.101.260,00	
~ LS BL	Rp.	10.366.517.825,00	Rp. 14.502.597.189,00
~ Penerimaan Lain-Lain		Rp.302.637.917,00-	
Total Mutasi Penerimaan			Rp 14.805.235.106,00
Mutasi Pengeluaran			
~ Penyetoran Saldo Awal	Rp.	0,00	
Ke Kas Daerah			
~ SPJ GU	Rp.	1.648.978.104,00	
~ SPJ TUP	Rp.	0 ,00	
~ SPJ LS BTL	Rp.	2.387.101.260,00	
~ LS BL	Rp.	10.366.517.825,00	
~ UP Nihil	Rp.	100.000.000,00	
~ Penyetoran CP	Rp.	0,00	Rp. 14.502.597.189,00
~ Pengeluaran Lain-Lain		Rp.302.637.917,00	
Total Mutasi Pengeluaran			Rp. 14.805.235.106,00
Sisa Kas di Bendahara			Rp. 0,00
Pengeluaran			

📁 Piutang (piutang lain-lain/PFK)

Nilai piutang per 31 Desember 2023 sebesar =Rp. 0,00,- (Nihil).

* **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Operasional SKPD. dan barang-barang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti Alt Tulis Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen bekas dan barang untuk di serahkan kepada Pihak Ketiga,

Dalam Neraca Badan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao Tahun 2024 =Rp. 0,00 (Nihil).

Aset Tetap

Aset tetap yang dimaksud disini adalah aset berwujud yang digunakan untuk penyelenggaraan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dan pelayanan kegiatan pada masyarakat serta yang dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum.

**PENUNJUKAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS LINGKUP SATUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.ROTE NDAO
TAHUN 2024.**

NO.	Nama	Jabatan	Merk/Type	Tahun	Warna	Nomor Polisi	Ket.
1.	Leksi N.Foeh,ST	Kepala Dinas Perkim.	Toyota Hilux Doubel cabin 2,4 G (4x4) M/T Diesel.	2019	Putih	DH. 9961 VB	
2.	Koresyn R. Rame Hau,ST,M.Si	Kabid.Analisis Dan Inforansi Lingkungan.	Yamaha/Lexi Vin	2019	Merah	DH.3025 VB	
3.	Maximus E.Dopen,ST	Kabid.Perumahan	Yamaha Vixion/2TP	2016	Hitam	DH.5988 YU	
4.	Marthin Ch. Telienoni	Pelaksana	Yamaha Mio Soul 2SX	2016	Hitam	DH.5987 YU	

5.	Roberth Fandoe	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Tanah.	Yamaha / 50C (T. 135 HC).	2014	Biru	DH.5897 WH	
6.	Muhammad S. Pa	Pelaksana.	Yamaha Vixion / 2TP	2016	Hitam	DH.5986 YU.	
7.	Ferdy Alexi Dami,ST	Kepala Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan.	Yamaha 3C1 (V-ixion/FZ150)	2013	Putih	DH.5821 YU	
8.	Anthonius Fernandes,ST	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum.	Yamaha 3C1 (V-ixion/FZ150	2013	Putih	DH.5822 FB	
9.	Jesy R.J.Henukh,SH	Pelaksana	Honda NF11b2D1 M/T	2013	Hitam	DH.5888 YU	
10.	Elifas Sajan,SH	Pelaksana	Honda /NF 100	2007	Hitam Biru	DH.5128 YU	

Tabel 5.12 : Kapitalisasi Belanja Modal

URAIAN ASET TETAP	JUMLAH UNIT	NILAI PENAWARAN	NILAI ASET (Rp)
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan kantor			
Laptop	1 Unit	13.500.000,-	13.500.000,-
Printer Epson	1 Unit	5.200.000,-	5.200.000,-
Jumlah		18.700.000,-	18.700.000,-

1. Tanah

Pengadaan/Pembelian/Pembebasan tanah per 31 Desember 2024 sebesar =Rp. 0,- yang berasal dari saldo awal Rp. 0,- yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13 : Kapasitas Belanja Tanah.

URAIAN ASET TETAP	JUMLAH UNIT	NILAI PENAWARAN	NILAI ASET (Rp)
Pengadaan/pembelian/pem Bebasan Tanah.		0,-	0,-
		0,-	0,-

2. Aset Lainnya

Aset lainnya yang dimaksud disini adalah aset tetap yang tidak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.13 : Mutasi Aset Lainnya Tabel 5.9 : Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai aset 2023	Nilai aset s/d Thn 2024	Bertambah/berkurang	Ket.
1.	Tanah	4.603.312.900,00	,00	,00	
2.	Peralatan dan Mesin	5.061.263.133,00	5.545.488.133,00	177.005.500,00	
3.	Gedung dan Bangunan	12.457.936.894,59	12.457.936.894,59	0,00	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.325.712.155,00	19.325.712.155,00	(18.346.256.902,00)	
6.	Aset tetap Lainnya	,00	20912.559.077,00	(647.685.000,00)	
7.	Konstruksi dalam pengerjaan	28.000.000	28.000.000 0,00	(28.000.000,00)	
	Aset Lainnya	1.856.687.697	1.658.687.697,00	(28.033.826.122,57)	
	Jumlah	41.476.225.082,59	41.960.450.082,59	(28.033.826.122,57)	

5.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban jangka pendek yang ada pada Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup adalah akun R/K Pusat yang merupakan akun untuk dikonsolidasikan yaitu akun yang bersifat sementara untuk menampung penerimaan uang dari BUD dan Penyetoran uang dari SKPD ke BUD.

5.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah merupakan modal SKPD atau kekayaan daerah SKPD yang didapat dari pembelanjaan aset (selisih antara jumlah aktiva dan Utang) dan didalam neraca dicatat sebagai :

1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek

Ekuitas dana lancar terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 8.596.554.019,93) dan per 31 Des 2023 sebesar (Rp.1.319.972.232,-) dengan rincian :

Nilai saldo awal	Rp.	0,-
Penyetoran PAD	Rp.	0,-
Contra Pos	Rp.	0,-

Belanja Daerah Rp. 14.502.587.189,-

Total Nilai SILPA (Rp. 14.502.587.189,-)

b. Cadangan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- dengan rincian :

Nilai saldo awal	Rp.	0,00
Mutasi berkurang	Rp.	0,00
Total Nilai Cadangan Piutang	Rp.	0,00

c. Saldo cadangan persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- (nihil).

2. Ekuitas dana investasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao menggambarkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi aset tetap dan aset lainnya.

5.2. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

5.2.1. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao menggunakan basis kas menuju akrual sesuai lampiran II Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, oleh karena itu dalam penerapan basis kas dalam pencatatan belanja dan pendapatan terdapat terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan pada saldo neraca yang dicatat secara akrual

5.2.2. Pengungkapan Informasi Lainnya.

- 1. Piutang lain-lain (PFK) senilai Rp. 0,- harus ditagih dan disetor ke Kas Daerah;
- 2. Nilai anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup TA.2024

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD ini yakni :

A. GAMBARAN UMUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka ditetapkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas dan pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas maka fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Kawasan Permukiman dan Bidang Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman Bidang dan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Lingkungan hidup
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

- g. laksanaan administrasi dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup.
- h. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan lingkungan hidup
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, maka susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan,Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Sekretaris (Sekretariat), terdiri dari :
 - 1.1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - 1.2. Kasubag. Keuangan dan Aset.
 - 1.3. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan)
2. Bidang Analisis & Informasi Lingkungan, terdiri dari :
 - 2.1. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
 - 2.2. Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan (Sub.Koordinator Substansi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
 - 2.3. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Lingkungan).
3. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari :
 - 3.1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat).
 - 3.2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penanggulangan persampahan/limbah.
 - 3.3. Sub.Bidang Pengawasan,Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 4.1. Penata Ruang Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman)
 - 4.2. Penata Ruang Ahli Muda (Sub. Koordinator Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman & Prasarana Sarana Utilitas Umum).
5. Bidang Perumahan.

- 5.1. Penata Ruang Ahli Muda (Sub.Koordinator Substansi Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan).
- 5.2. Sub.Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Perumahan.
- 5.3. Sub.Bidang Pembangunan dan Pengendalian Perumahan.

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagaimana terlampir.

C. Pegawai

Pegawai yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

- 1. Pegawai Tetap / Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berjumlah 32 orang,dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	GOL	JABATAN	TANGGUNGAN			KET
				ISTERI/S UAMI	ANAK	JUMLA H	
GOLONGAN IV							
1.	Leksy N. Foeh, ST	IV/c	Kepala Dinas	0	2	3	
2.	Desi I.A.N. Haning, ST. M.Eng	IV/a	Sekretaris	0	0	1	
3.	Robert Fandoe, SH	IV/a	Kabid	1	1	3	
4.	Maximus E. Dopen, ST	IV/a	Kabid	1	1	3	
5.	Robiyanto P. Tolla, ST	IV/a	Kabid	1	2	4	
GOLONGAN III							
6.	Koresyn R. Rame Hau, ST, M.Si	III/d	Kabid	0	0	1	

7.	Wahyudi Kastamun, SE	III/d	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	1	3	
8.	Susandi L. Foeh, SP	III/d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1	1	3	
9.	Desembry W.D. Tari, ST	III/d	Penata Kelola Bangunan Kawasan Ahli Muda	0	1	2	
10.	Ferdy Alexi Dami, ST	III/d	Penata Kelola Bangunan Gedung	1	2	4	
11.	Srileny D.A. Pakuleo, SE	III/d	Perencana Ahli Muda	0	0	1	
12.	Melky Y. Messakh, ST	III/d	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	0	0	1	
13.	Yuminglis Aplugi	III/c	Kasubag. Keuangan dan Aset	0	0	1	
14.	Anthonius Fernandez, ST	III/d	Penata Ruang Ahli Muda	1	2	4	
15.	Jodi R. Oeina, SE	III/c	Pelaksana	1	1	3	
16.	Dance Stefanus Menno, ST	III/c	Pelaksana	1	0	2	
17.	Elifas Sajan, SH	III/b	Pelaksana	1	2	4	
18.	Septiana Amalo, A.Md	III/b	Pelaksana	1	2	4	
19.	Joab Eliazar Sodak, A.Md	III/b	Pelaksana	1	2	4	
20.	Jesy Rene Junior Henukh, SH	III/b	Pelaksana	0	0	1	
21.	Lifaldy Herman Manafe	III/a	Pelaksana	0	0	1	
22.	Carles Cornelis Ndaomanu, S.T	III/a	Pelaksana	0	0	1	

23.	Thomianus Junaidi Loe Tae, S.T	III/a	Pelaksana	0	0	1	
24.	Semuel A. Diponugroho Johannis, S.T	III/a	Pelaksana	0	0	1	
25.	Danial Pah	III/a	Pelaksana	0	0	1	
GOLONGAN II							
26.	Marthin Ch. Telienoni	II/d	Pelaksana	1	2	4	
27.	Teli Efleda Faah	II/c	Pelaksana	0	0	1	
28.	Arni Ambrosius Tanesib	II/c	Pelaksana	1	2	4	
29.	Muhammad Safari Pa	II/c	Pelaksana	0	0	1	
30.	Marthen Pandie	II/c	Pelaksana	1	2	4	
31.	Selfiana Hendriany Tassi	II/c	Pelaksana	0	0	1	
32.	Yandry Oktovianus pa	II/b	Pelaksana	1	2	4	

2. Pegawai Tidak Tetap / Pegawai Kontrak.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Rote Ndao 1. No.95/KEP/HK/2024 tanggal,07-02-2024 (SK Lampiran I) Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mendapat 45 (Empat Puluh Lima) Orang dengan masa kerja selam 10 (sepuluh) Bulan TMT Januari 2024 dan pembayaran yang dibebankan dalam DPA Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. 2. SK.No 95/KEP/HK/2024 Tanggal, 07-02- 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 (SK Lampiran III) Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Rote Ndao mendapat 8 (Delapan) Orang, dengan masa kerja selama 6 (Enam) Bulan TMT Bulan Januari 2024 dan pembayaran yang dibebankan dalam DPA Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.SK.I Sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang semua melaporkan diri, pada SK.ke III Sebanyak 8 (Delapan pada .SK.III sebanyak 8 (Delapan) orang semua melaporkan diri jadi Total yang bekerja sebanyak 53 (Lima puluh tiga) orang ~ dengan perincian mendapat tugas dan tanggung jawab selama 10 (Sepuluh) bulan, 45 (Empat Puluh Lima)Orang yang ~mendapat Tugas selama 6 (enam) bulan sebanyak 8 (Delapan) Orang jadi total semua sebanyak 53 (lima puluh Tiga) Orang dengan masa kerja pelaksanaan tugas yang berbeda-beda sebagai berikut :

NAMA DAN JABATAN TENAGA KONTRAK DAERAH TAHUN 2024
NO SK: 95/KEP/HK/2024
TANGGAL 07 FEBRUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KONTRAK	MASA KERJA/PEMBAYARAN HONOR	TMT	KETERANGAN
1	Very Duminggus Ndoen	Sopir Pimpinan	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
2	Semi Nock	Cleaning Service	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
3	Noak A. Boik	Penjaga Malam	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
4	Ipin I. Maakh	Operator Komputer	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
5	Demsey Seprianus Ndun	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
6	Felipus J. Penna	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
7	Jhon B. Aplugi	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
8	Buce I. Malelak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
9	Buce H. Sooi, A.Md	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
10	Fenci Sooi	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
11	Krisna Ndun	Penjaga TPA Oelunggu	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
12	Mersiana Bolla	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
13	Erni Y. Ledoh	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
14	Soleman Toba	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
15	Yavesina Toumeluk	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
16	Steven Dae Panie	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
17	Magdalena M. Bessie	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I

18	Martinus Adu	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
19	Mesak Lonak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
20	Yumisma M. Bulak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
21	Yanti Marlina Kotten	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
22	Arianto Adu	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
23	Yeni A. Baba	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
24	Seprianus Moni	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
25	Yerias H. Bessie	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
26	Trinci Novi Polin	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
27	Roni S. Naru	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
28	Rixar Sam Radja	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
29	Isaskar Kadek	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
30	Melkianus Saek	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
31	Seprianus Ledoh	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
32	Jermias Dethan	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
33	Yakobis Hanas	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
34	Anderias C. F. Doh	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
35	Jesse J. Balukh	Tenaga Kerbersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
36	Rosenci Juliana Thonak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
37	David Edison Sau	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
38	Martselin S. Ngginak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
39	Melki Otto	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
40	Sarles P. Bailaen	Sopir Mobil Sampah	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
41	Yosep M. Bailaen	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
42	Marsina M. Taunu	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
43	Megi Mata	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I
44	Marleni M. Dillak	Tenaga Kebersihan Kota	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I

45	Alexander Ndun	Penjaga TPA Oelunggu	10 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran I

NAMA DAN JABATAN TENAGA KONTRAK DAERAH TAHUN 2024
NO SK: 95/KEP/HK/2024
TANGGAL 07 FEBRUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KONTRAK	MASA KERJA/PEMBAYARAN HONOR	TMT	KETERANGAN
1	Ingke Welhelmince Su’y, S.Tr. Par	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
2	Ingried Ervina Haning, ST	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
3	Joko Pau	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
4	Konstantinus Ndolu, SE	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
5	Lidian Pah	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
6	Polce Mandala	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
7	Yohanis Mbau, A.Md.T	Tenaga Administrasi Umum	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
8	Yumi Aranci Ndun, S.PT	Tenaga Kebersihan	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III
9	Adipapa Petrus Sooi	Tenaga Kebersihan	6 Bulan	TMT Januari	SK Lampiran III

Besaran honor /bulan/orang sebesar Rp. 1.250.000,- sehingga beban biaya yang dibayarkan kepada tenaga kontak pada tahun 2024 sebesar Rp. 629.750.000,- yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Honorarium Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum :

2 Orang
- Honorarium Jasa Tenaga Adminstrasi

:

7 Orang
- Honorarium Tenaga Operator Komputer

:

1 Orang
- Honorarium Tenaga Kebersihan

:

42 Orang
- Honorarium Jasa Tenaga Sopir

:

1 Orang

BAB VII

P E N U T U P

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan,Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sistematikanya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan Dinas Perumahan,Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD atas pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kami mengharapkan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan ini juga dapat memberikan informasi secara riil dan akuntabel kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan unsur teknis terkait.

Baa, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Perumahan,Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao,



LEKSY N. FOEH, ST
Pembina Tk.I
NIP. 19711118 2000003 1 033

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yg memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Baa, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran/
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Lingkungan
Kabupaten Rote Ndao



LEKSY N.FOEH, ST

Pembina Tk.I

NIP. 197111118 200003 1 003